

Peranan Kearifan Budaya Lokal *Pada Gelahang* untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Upacara *Ngenteg Linggih lan Ngusaba* Desa Adat Tunju

Putu Lusiana Dewi*, Anantawikrama Tungga Atmadja

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

*dlusiana178@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
12 Mei 2020

Tanggal diterima:
22 Mei 2020

Tanggal dipublikasi:
31 Agustus 2020

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, *Ngenteg Linggih, Ngusaba Desa, Pada Gelahang*

Pengutipan:

Dewi, P. L., & Atmadja, A. T. (2020). Peranan Kearifan Budaya Lokal *Pada Gelahang* untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Upacara *Ngenteg Linggih lan Ngusaba* Desa Adat Tunju. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 146-159

Keyword: Accountability, Financial Management, *Ngenteg Linggih, Ngusaba Desa, Pada Gelahang*

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: (1) sumber dana upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* di *desa adat* Tunju, (2) akuntabilitas pengelolaan keuangan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* di *desa adat* Tunju dan (3) peranan dari kearifan budaya lokal *pada gelahang* untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* di *desa adat* Tunju. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sumber dana upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* berasal dari *dana peturunan*, bantuan keuangan khusus, *dana punia, sesari* serta hasil penjualan baju kaos dan *pekir*, (2) proses pengelolaan keuangan *ngenteg linggih lan ngusaba desa* melalui tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang didalamnya ada pertanggungjawaban dari panitia, (3) peranan kearifan budaya lokal *pada gelahang* mampu mewujudkan kebersamaan, rasa saling memiliki, saling percaya dan integrasi yang kuat antara pihak *prajuru desa*, panitia dan *kramadesa* dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* di *desa adat* Tunju.

Abstract

This research has a purpose: (1) the source of funds for the ngenteg linggih lan ngusaba desa ritual in the Tunju village, (2) accountability of financial management of the ngenteg linggih lan ngusaba desa ritual in the Tunju village, and (3) the role of local cultural wisdom pada gelahang for realizing accountability of financial management ngenteg linggih and ngusaba desa ritual in the Tunju village. Data collection techniques are carried out by conducting observations, interviews and documentation studies. The result show that (1) the source of funds for the ngenteg linggih lan ngusaba desa ritual fund came from dana peturunan, special financial assistance, dana punia, sesari and the sale of t-shirts and pekir as well as the proceeds from the sale of t-shirt and pekir, (2) the process of financial management of ngenteg linggih lan ngusaba desa ritual through the three stages are planning, implementation and evaluation in which there is accountability from the commite, (3) the role of local cultural wisdom pada gelahang able togetherness, a sense of mutual ownership, mutual trust and strong integration between prajuru desa, commite and village manners in accountability for financial management of ngenteg linggih lan ngusaba desa ritual in the Tunju village.

Pendahuluan

Keberadaan *desa adat* di Bali tidak bisa terlepas dengan keberadaan *pura Kahyangan Tiga*. *Pura* adalah tempat sembahyang untuk umat Hindu dan *pura Kahyangan Tiga* yang menjadi ciri khas dari *desa adat* di Bali. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 *desa adat* memiliki tanggung jawab terhadap keberadaan *kahyangan desa*. *Desa adat* terbagi dalam tiga unsur yaitu berkaitan dengan *parahyangan, pawongan dan palemahan*. Dalam penerapan konsep *parahyangan* suatu *desa adat* harus melaksanakan upacara keagamaan seperti *ngenteg linggih lan ngusaba desa*.

Salah satu *desa adat* di Bali yang telah melaksanakan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* adalah *desa adat* Tunju yang berada di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* ini memerlukan berbagai jenis sumber daya kolektif sebagai penunjang. Sumber daya tersebut berasal dari modal struktur *prajuru desa adat* maupun modal sosial yang dapat diberikan untuk menunjang keberlangsungan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* ini. Maka penting bagi *krama desa* untuk mengetahui proses pengelolaan sumber daya tersebut karena sesuai dengan praktik akuntabilitas. Penyusunan laporan keuangan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* menjadi sangat penting dalam menciptakan akuntabilitas.

(Mardiasmo, 2004) mengungkapkan akuntabilitas publik adalah penyampaian dan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas yang dibuat oleh pihak yang melaksanakan aktivitas kepada yang memberikan kewenangan untuk menjalankan aktivitas tersebut. Adapun alasan yang memotivasi peneliti melakukan penelitian di *desa adat* Tunju adalah pertama, tingkat pendidikan *panitia upacara ngenteg linggih lan ngusaba desa* dan *prajuru desa* sebagian besar jenjang pendidikan terakhirnya hanya sampai pada tingkat sekolah menengah, belum ada yang berasal dari jurusan akuntansi sehingga pemahaman tentang pembuatan laporan keuangan masih kurang padahal *panitia* akan membuat laporan pertanggungjawaban mengenai upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* dan diawasi oleh *prajuru desa adat*. Hal ini diungkapkan oleh Ketut Arta selaku *bendesa adat* Tunju bahwa,

“Yang dipilih oleh *krama desa* hanya *bendesa adat* melalui pemilihan yang diadakan oleh *desa adat*, ketika *tiang* terpilih *dados bendesa adat*. *Tiang* sane memilih *penyarikan, petengen, kelian banjar, kelian tempekan, baga parahyangan, baga pawongan, baga palemahan*. Menurut *tiang* pendidikan *nika* sangat penting. *Yening dados* (kalau menjadi) *prajuru desa*, *dados* (menjadi) *panitia upacara* harus *nawang mase* (tahu juga) akuntansi. *Care* (seperti) *petengen / bendahara nika* sebaiknya dari jurusan akuntansi karena akan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan di *desa pang sing pelih* (biar tidak salah), *yen* (kalau) *dadi panitia kenten mase* (begitu juga) *lakar ngae laporan pertanggungjawaban upacara karya ngenteg linggih lan ngusaba desane* dan *prajuru desanesane dados* (menjadi) *pengawas kinerja* dari *panitia*. *Nangingdriki nak akehan* (tapi disini lebih banyak) *krama desasane* tamat SMP lan SMA *kemanten lan nyak* (saja dan mau) *ngayah di desa*”.

Fenomena yang terjadi di *desa adat* Tunju bahwa *panitia* sebagai pelaksana kegiatan dan *prajuru desa adat* yang berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan kegiatan keduanya sebagian besar jenjang pendidikan terakhirnya hanya sampai pada tingkat sekolah menengah dan belum ada yang berasal dari jurusan akuntansi, pemahaman tentang laporan keuangan masih kurang, sehingga hal ini dapat menimbulkan keraguan apakah *panitia* mampu untuk membuat pertanggungjawaban terkait dana upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* dan *prajuru desa adat* mampu untuk melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan upacara tersebut, hal ini merupakan kesenjangan antara kenyataan dan yang seharusnya terjadi, seperti yang diungkapkan (Hanafi, 2017) bahwa pemahaman akuntansi yang kurang dari penyusunnya menimbulkan kualitas laporan keuangan menjadi rendah. Keahlian sumber daya manusia yang dimiliki oleh entitas berperan penting dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan melakukan pengendalian terhadap entitas tersebut. Keberhasilan dalam mengelola keuangan tidak terlepas dari sumber daya yang

berasal dari latar belakang pendidikan akuntansi, dan memiliki pengalaman di bidang keuangan.

Kedua, di *desa adat* Tunju terdapat keberadaan kearifan lokal yang secara turun temurun yaitu *pada gelahang* yang menjadi landasan dalam melakukan aktivitas dalam upacara yang dilakukan oleh *desa adat* Tunju. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketut Arta selaku *bendesa adat* Tunju bahwa

“*Yen* (kalau) di *desa tiange niki* (saya ini) mengenal istilah *pada gelahang*. *Pada gelahang niki* (ini) sudah lama mendasari *upacara di desa driki* (desa di sini). Itu sama dengan semua milik bersama, *kenten* (begitu). Jadi upacara apapun yang dilaksanakan oleh *desa adat niki* (itu) semua menjadi tanggung jawab bersama. *Pada-pada gelahang keto* (sama-sama memiliki begitu), *jele melah* (jelek bagus) milik bersama *keto* (begitu), *dik*. *Yadiastun dados prajuru desa*, panitia, *krama desa* tetap *ngayah sareng sami*, *ten wenten* perbedaan *dik*, upacara *niki* milik bersama, kita saling membantu, untuk keuangan juga demikian, *yen* (kalau) misalnya uang kan dipegang penuh oleh bendahara, tapi tetap itu uang bersama dan *krama desa* berhak mengetahui pertanggungjawaban keuangannya”

Kearifan budaya lokal *pada gelahang* sangatlah kental pada setiap upacara yang dilaksanakan di *desa adat* Tunju. Konsep ini dipegang teguh oleh setiap *krama*, untuk menghilangkan adanya perbedaan antara *prajuru desa* dengan *krama desa*, sehingga menyatu dan terintegrasi. Berikut pernyataan *krama desa adat* Tunju bapak Ketut Supelden menyampaikan bahwa,

“Tidak ada hambatan yang saya lihat. Upacara *ngenteg linggih dan ngusaba desa* berjalan dengan lancar karena kita semua saling membantu kan ini upacaranya kita semua yang punya, *krama desa* semua *ngayah* di pura membantu panitia dan *prajuru desa* untuk mempersiapkan sarana upacara”.

Dari pernyataan yang disampaikan bapak Ketut Supelden selaku *krama desa adat* Tunju menunjukkan bahwa upacara *ngenteg linggih dan ngusaba desa* berjalan lancar tanpa adanya hambatan karena *krama desa adat* Tunju saling membantu panitia dan *prajuru desa* dalam mempersiapkan sarana upacara. Budaya *pada gelahang* memang sangat terlihat dimana upacara apapun itu yang dilaksanakan menjadi tanggungjawab bersama. Sudah banyak peneliti akuntansi yang melakukan penelitian berkaitan dengan akuntabilitas seperti (Dewi, 2008) mengungkapkan bahwa akuntabilitas yang diterapkan oleh lembaga perkreditan desa Tukadmungga (LPD) berkaitan dengan konsep *tri hita karana*. (Lestari, 2014) mengungkapkan bahwa *desa pakraman* Kubutambahan dalam praktik akuntabilitas memakai sistem pertanggungjawaban akuntansi secara sederhana dan dikaitkan dengan kepercayaan. Penelitian lain juga dilakukan (Warisando, 2017) mengungkapkan bahwa budaya lokal *pang pada melah* menjadi landasan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* pada upacara *ngenteg linggih*, begitu juga sistem pengelolaan keuangannya. Penelitian tentang pengelolaan keuangan upacara *ngenteg linggih dan ngusaba desa* memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti akuntansi, pada penelitian ini akuntabilitas pengelolaan keuangan dilandasi dengan nilai kearifan lokal.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: (1) dari mana saja sumber dana upacara *ngenteg linggih dan ngusaba desa* di *desa adat* Tunju, (2) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan upacara *ngenteg linggih dan ngusaba desa* di *desa adat* Tunju, dan (3) Bagaimana peranan dari kearifan budaya lokal *pada gelahang* untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan upacara *ngenteg linggih dan ngusaba desa* di *desa adat* Tunju.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengangkat fenomena yang terjadi di suatu tempat dan disajikan sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini difokuskan pada peranan kearifan budaya lokal *pada gelahang* untuk mewujudkan auntabilitas pengelolaan keuangan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* di *desa adat* Tunju, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer bisa didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap informan, sedangkan data sekunder tersebut berupa buku-buku yang berisi teori dan jurnal ilmiah yang mendukung penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah *bendesa adat* Tunju, ketua panitia upacara, wakil ketua panitia, sekretaris, bendahara *ngenteg linggih lan ngusaba desa*, dan *krama desa adat* Tunju. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan upacara *ngenteg linggih, lan ngusaba di desa adat* Tunju. Teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi dilakukan peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan data. Data yang sudah terkumpul di peneliti akan dianalisis dengan cara reduksi data agar data penelitian tidak menyimpang dengan pertanyaan penelitian (Moloeng, 2006). Data yang telah direduksi disajikan dan dilakukan penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Sumber Dana Upacara Ngenteg Linggih lan Ngusaba Desa di Desa Adat Tunju

Dalam melaksanakan upacara keagamaan seperti *ngenteg linggih lan ngusaba desa*, tentunya membutuhkan dana untuk membeli sarana dan prasarana upacara. Dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 disampaikan bahwa *desa adat* memiliki beberapa sumber pendapatan meliputi pendapatan asli yang diperoleh oleh *desa adat*, hasil dari upaya pengelolaan *padruwen yang desa adat* miliki, bantuan dari hibah dan sumbangan (*dana punia*). Sumber dana dalam upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* di *desa adat* Tunju berasal dari *dana peturunan* dan bantuan keuangan khusus (BKK) dari pemerintah provinsi pada tahun 2019. *Dana peturunan* tersebut wajib dibayarkan oleh *krama desa* sebesar Rp 100.000 per Kepala keluarga, bagi *krama desa* yang tidak membayar akan dikenakan *penikel* (membayar tiga kali lipat dari jumlah *dana peturunan*), pembayaran *dana peturunan* dilakukan 3 bulan sebelum upacara dan pembayaran terakhir 2 minggu sebelum upacara berlangsung sehingga total dana yang terkumpul sebesar Rp 100.000.000. Selain *dana peturunan* dari *krama desa*, sumber dana juga didapatkan dari pemerintah berupa bantuan keuangan khusus (BKK) tahun 2019 sebesar Rp 137.200.000. Hal ini disampaikan oleh Ketut Sirma selaku bendahara panitia *ngenteg linggih lan ngusaba desa* di *desa adat* Tunju yang menyatakan bahwa,

“Salah satu sumber dana upacara dari *krama desa* berupa *dana peturunan* sebesar Rp 100.000 per KK (Kepala keluarga). *Dana peturunan* ini sifatnya wajib karena bagi yang tidak membayar akan dikenakan *penikel* (membayar tiga kali lipat dari jumlah *peturunan*) sehingga *dana peturunan* yang terkumpul sebesar Rp 100.000.000. Pemungutan *dana peturunan* dilakukan 3 bulan sebelum upacara dilaksanakan dan pembayaran terakhir 2 minggu sebelum upacara berlangsung. Selain *dana peturunan* panitia juga menggunakan dana BKK yang diberikan pemerintah Provinsi tahun 2019 sebesar Rp 137.200.000. Untung juga ada dana BKK jadinya *krama desa* sedikit kena *peturunan*”

Sebelum dan saat pelaksanaan upacara, banyak *krama desa* yang medane *punia*. *Dana punia* yang dihaturkan ini ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa uang. Hal ini disampaikan oleh Nyoman Bakson selaku ketua panitia *ngenteg linggih lan ngusaba desa* dalam kutipan wawancara yang menyampaikan bahwa,

“Saya bangga terhadap *krama desa* karena banyak yang medane *punia*. Ada barang yang di *dana puniakan* ada juga uang. Apapun itu kami terima saja yang penting mereka ikhlas. Bahkan saya tidak menyangka sampai akhir upacara *dana punia*”

berupa uang yang terkumpul sebesar Rp 124.577.000. *Dana punia* berupa barang juga lumayan banyak ada dupa, kain putih kuning, beras, bawang merah, aqua, tedung agung, kopi, gula pasir, dan jajan”.

Jadi dapat disimpulkan dalam upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* ini mendapat tambahan dana dari *dana punia* yang dihaturkan oleh *krama desa*. Panitia upacara tidak pernah melarang *krama desa* yang memiliki niat untuk menghaturkan *dana punia*, apapun yang mereka haturkan diperbolehkan saja oleh panitia asal dengan niat yang tulus dan ikhlas. *Dana punia* yang berupa uang terkumpul Rp 124.577.000, dan *dana punia* yang berbentuk barang seperti dupa, kain putih kuning, beras, bawang merah, aqua, tedung agung, kopi, gula pasir, dan jajan ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan upacara.

Dalam serangkaian upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* yang berlangsung cukup lama, selain mendapatkan *dana punia* dari *pemedek*, panitia upacara juga memperoleh *sesari* yang dihaturkan oleh *krama desa* pada saat upacara berlangsung. *Sesari* yang terkumpul sebesar Rp 10.572.000 dengan rincian *sesari nregem duasa* Rp 458.000, melasti ke segara Rp 1.000.000, *sesari di jeroan pura desa* Rp 8.071,000, melasti ke tukad Rp 143.000, *sesari nyegara gunung* Rp 700.000 dan *sesari* pada waktu nglemekin Rp 200.000” yang digunakan untuk dana upacara. Dalam rangka untuk menambah dana upacara panitia juga menjual baju kaos seharga Rp 60.000 dan *pekir* (ikat kepala) dan *pekir* seharga Rp 10.000 kepada *krama desa adat* Tunju. Penjualan baju kaos dan *pekir* ini sangat diapresiasi oleh *krama desa* sehingga banyak yang laku terjual dan berhasil terkumpul dana sebesar 4.210.000. Hal ini disampaikan oleh Ketut Yartawan selaku sekretaris panitia *ngenteg linggih lan ngusaba desa* dalam kutipan wawancara yang menyampaikan bahwa,

“Selain *dana punia* yang masuk di panitia, kita juga memperoleh *sesari* yang dihaturkan oleh *krama desa* pada saat upacara berlangsung, *sesari* ini kami gunakan untuk tambahan dana upacara. *Sesari* yang terkumpul pada saat itu sebesar Rp 10.572.000 dengan rincian *sesari nregem duasa* Rp 458.000, melasti ke segara Rp 1.000.000, *sesari di jeroan pura desa* Rp 8.071,000, melasti ke tukad Rp 143.000, *sesari nyegara gunung* Rp 700.000 dan *sesari* pada waktu nglemekin Rp 200.000. Sebagai bentuk penggalangan dana kami panitia menjual baju kaos seharga Rp 60.000 dan *pekir* (ikat kepala) untuk wanita seharga Rp 10.000. Pembelian baju kaos maupun *pekir* tidak bersifat memaksa, dari penjualan baju kaos dan *pekir* terkumpul dana sebesar Rp 4.210.000. Dana ini kami gunakan untuk menunjang pelaksanaan upacara”.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Upacara Ngenteg Linggih lan Ngusaba Desa di Desa Adat Tunju

Pengelolaan keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi organisasi guna membantu memperlancar dalam pencapaian tujuannya. (Mulyasa., 2002) mengungkapkan bahwa dalam melakukan suatu pengelolaan keuangan melalui beberapa tahapan diantaranya 1) Perencanaan adalah suatu kegiatan memberi arahan secara sistematis kepada sumber daya yang ada agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan, 2) pelaksanaan adalah suatu tahapan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang disusun, apabila tidak sesuai dengan rencana akan disesuaikan dengan konsisi yang terjadi. 3) Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana rencana yang telah disusun sebelumnya bisa tercapai dalam kegiatan

Begitu juga dengan pelaksanaan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* di *desa adat* Tunju yang sudah pasti memerlukan pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan dalam upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* dilakukan melalui tiga tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, *prajuru desa* mengadakan beberapa kali *paruman* yang diawali dengan *paruman prajuru desa*, *paruman manggala desa* dan *paruman desa* untuk mencari kesepakatan *krama desa* mengadakan upacara dengan pengenaan *dana peturunan* Rp100.000, menyiapkan mental *krama desa* karena sebagai pelaksana membantu panitia dan *prajuru desa* mempersiapkan sarana

upacara, bahkan ada yang menjadi *saye* dan ada yang dikenai *banten*. Ketika *krama desasudah* sepakat mengadakan upacara maka dilakukan pembentukan panitia upacara agar pengelolaan upacara bisa optimal. Dari hasil wawancara dengan Ketut Arta selaku *Bendesa adat* Tunju beliau menjelaskan bahwa,

“ *Awalne* (awalnya) *tiang ngadaang paruman prajuru adatdumun* (dulu) tanggal 24 agustus 2019 membahas rencana *lakar ngadaang* (akan mengadakan) *karyangenteg linggih lan ngusaba desa*, staf adat *sami* (semua) setuju, lanjut *ngadaang* (mengadakan) *paruman manggala desa adat* Tunju pada 31 agustus 2019 *polih* (mendapat) persetujuan dalam porum dan keputusan *nika* (itu) di bawa ke *paruman desa adat*. *Benjangne* (besoknya) langsung *tiang* (saya) *ngadaang* (mengadakan) *paruman desa adatnyampeang* (menyampaikan) *lakar ade* (akan dilaksanakan) upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa*, *sami* (semua) *krama desa* setuju *mampun* (karena) *sampun sue* (sudah lama) *ten wenten* (tidak ada) karya *ageng* (besar) *driki* (disini) lan sepakat kena *peturunan* Rp 100.000, *ngelantur* (selanjutnya) dilakukan pemilihan panitia *malih* (lagi tiga harinya) *tigang rahinane anggen* (untuk) mengelola *karya puniki* (ini) ”.

Hal ini diperkuat oleh Nyoman Bakson selaku ketua panitia *ngenteg linggih lan ngusaba desa* dari hasil wawancara dengan beliau bahwa,

“Yang perlu dipersiapkan pertama tentunya membentuk panitia upacara untuk mengoptimalkan kinerja pada waktu upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa*, mengumpulkan dana untuk membeli sarana dan prasana upacara, setiap dana yang masuk akan dicatat oleh bendahara di pembukuan dan diumumkan kepada *krama desa* serta yang paling penting menyiapkan mental *krama desa* karena akan sering *ngayah* mempersiapkan sarana upacara yang menjadi *saye* dan ada yang dikenai *banten*.

Dalam tahapan perencanaan juga terjadi penerimaan kas yang berasal dari *dana peturunan*, bantuan keuangan khusus tahun 2019, *dana punia*, *sesari* serta penjualan baju kaos dan *pekir*. Kas yang masuk akan dicatat dalam pembukuan, diterima dan dikelola oleh bendahara upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa*. Ketika dana sudah terkumpul panitia akan membuat rancangan biaya yang nantinya dikeluarkan untuk upacara. Hal ini disampaikan oleh Kadek Mariasa selaku wakil ketua panitia *ngenteg linggih lan ngusaba desa* dari hasil wawancara beliau menyampaikan bahwa,

“Tentunya membuat rancangan biaya. Rancangan biaya kita susun bersama panitia dan juga *prajuru desa* dalam *paruman*. Ini salah satu bentuk perencanaan dari upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* agar kita bisa mengetahui berapa nantinya menghabiskan biaya. Tidak hanya itu dengan rancangan biaya kita jadi tahu apa saja yang harus dibeli dan berapa perlu biaya seperti biaya *banten*, biaya konsumsi, biaya perlengkapan upacara”.

Jadi dapat disimpulkan panitia *ngenteg linggih lan ngusaba desa* adat Tunju sebelum melaksanakan upacara sudah mempersiapkan suatu rancangan biaya. Rancangan biaya dibahas bersama panitia dan *prajuru desa adat* di *paruman*. Penyusunan anggaran penting dilakukan sebelum upacara dilaksanakan agar memberikan suatu gambaran biaya yang dihabiskan pada saat upacara tersebut sehingga dari panitia sudah dapat menyiapkan uang dari sumber-sumber dana yang masuk. Setelah melakukan perencanaan langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Suatu pelaksanaan dikatakan baik jika sesuai dengan rencana sebelumnya oleh panitia *ngenteg linggih lan ngusaba desa* adat Tunju. Pelaksanaan dalam keuangan yang dimaksudkan adalah ketika proses pengeluaran keuangan untuk membeli sarana dan prasarana pelaksanaan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa*. Pada pelaksanaan keuangan yang pertama kali dilakukan oleh panitia dalam hal ini ketika

bendahara memberikan uang kepada masing-masing seksi untuk membeli kebutuhan upacara. Masing-masing seksi membeli perlengkapan upacara sesuai dengan kebutuhannya. Dari hasil wawancara dengan Ketut Sirma selaku bendahara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* menyatakan bahwa,

“Ketika pelaksanaannya, saya sebagai bendahara memberikan uang kepada masing-masing koordinator seksi sesuai dengan rancangan anggaran biaya baik seksi upacara, perlengkapan, konsumsi dan seksi lainnya agar sesegera mungkin dapat melaksanakan tugasnya”. Setiap koordinator seksi yang meminta uang akan saya catat supaya tidak terjadi kekeliruan nantinya kan ini uang bersama biar jelas pengeluarannya”.

Proses akhir dari pengelolaan keuangan adalah evaluasi. Tahap evaluasi pengelolaan keuangan yaitu adanya suatu pertanggungjawaban keuangan dari panitia *ngenteg linggih lan ngusaba desa* kepada *krama desa adat* Tunju berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini harus disampaikan secara terbuka kepada *krama desa* sesuai dengan yang disampaikan (Atmadja & Dkk, 2013) dalam menjalankan operasinya suatu entitas dituntut agar mampu melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan apa yang menjadi keputusan dari entitas harus disajikan secara terbuka. (Mardiasmo, 2004) mengungkapkan akuntabilitas adalah penyampaian informasi dan pertanggungjawaban segala aktivitas yang dibuat oleh pemberi amanah kepada pihak pemegang amanah. Bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* dibuat secara sederhana, berisi mengenai sumber-sumber pemasukan, biaya yang dikeluarkan dan sisa dana upacara. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan maksimal tiga minggu setelah pelaksanaan upacara. Hal ini disampaikan oleh Ketut Sirma selaku bendahara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* yang menyatakan bahwa,

“Dalam pengelolaan keuangan *nika* perencanaan *dumun*, di *paruman* dibahas perkiraan *kude nelahang biaya* (berapa menghabiskan biaya) *sareng* (sama) panitia lainnya dan *prajuru desa* untuk mencapai kesepakatan. Dalam Pelaksanaannya masing-masing koordinator seksi meminta uang kepada *tiang* selaku bendahara. *yening karyane sampun usan* (kalau upacaranya sudah selesai) koordinator seksi memberikan nota dan kwitansi kepada *tiang* untuk *tiang* buat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang sudah saya buat saya bacakan dalam *paruman* yang *ten wenten* masalah. *Mangda sami uning* (biar semua tahu) berapa dapat pemasukan, darimana saja pemasukan itu, berapa keluar biaya, untuk membeli apa saja. Jika ada sisa uang biar jelas juga. Kita sudah diberi kepercayaan oleh *krama desa*, maka kita juga tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan itu. *Paruman* tentang pertanggungjawaban sudah dilakukan pada tanggal 17 Nopember 2019 *sane sampun lintang* (yang sudah lewat)”.

Hal ini diperkuat oleh Ketut Arta selaku *bendesa adat* Tunju dari hasil wawancara menyatakan bahwa,

“*Nggih usan* (ya setelah) upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa nika* (itu), kurang lebih tiga minggu *nike wenten pun paruman* (itu ada rapat) *krama desangomongan* (membicarakan) masalah *penelas lan sisa kas kenten* (biaya dan sisa kas begitu). *Tiang* selaku penanggungjawab upacara *niki* (ini) mendampingi panitia dalam *paruman* pertanggungjawaban *nika* (itu). *Yen* (kalau) *ring desa adat Tunju, krama desane sane prasida rauh* (yang bisa hadir) *tiang icenin sami* (saya memberikan semua) kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat kalau ada kekurangan mengenai pertanggungjawaban *kenten* (begitu)”

Panitia upacara memang sudah melakukan *paruman krama desa* pada tanggal 17 Nopember 2019 dalam *paruman* itu dibacakan mengenai sumber pendapatan, pengeluaran maupun sisa uang dalam upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa*, hal ini memang dibenarkan oleh Nyoman Mudin salah satu *krama desa* adat Tunju dari hasil wawancara menyatakan bahwa,

“Nggih di *paruman* dibacakan laporannya oleh panitia”. Dapat uang dari mana saja, biaya yang habis untuk upacara, apa saja yang dibeli, sisanya semua disampaikan. Sudah bagus menurut *tiang* semua disampaikan jadinya *tiang* (saya) tidak bertanya-tanya lagi. Kalau tidak salah *parumannya* tanggal 17 Nopember 2019”.

Jadi dapat disimpulkan panitia upacara telah membuat laporan pertanggungjawaban dan menyampaikannya kepada *Krama desa* karena mereka berhak untuk mengetahui laporan keuangan secara jelas dan lengkap tanpa harus ditutupi karena *krama desa* sebagai pemberi amanah kepada panitia, maka memang sudah seharusnya panitia mengadakan *paruman krama desa* membahas mengenai pertanggungjawaban dari upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* tersebut agar mereka mengetahui secara jelas biaya-biaya yang dikeluarkan dan sisa uang upacara. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh *panitia ngenteg linggih lan ngusaba desa* dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban sudah baik. Sebelum upacara berlangsung sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan bersama *krama desa* melalui *paruman* sampai upacara *ngenteg linggih lan ngusaba* pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* selesai panitia kembali mengadakan *paruman* desasewara terbuka kepada seluruh *krama desa*. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan baik proses pengumpulan dana maupun pertanggungjawabannya dilakukan oleh bendahara upacara dengan pengawasan ataupun otorisasi dari *bendesa adat* Tunju dan sepengetahuan ketua panitia, sekretaris dan juga *krama desa*. Penyajian pertanggungjawaban kepada *krama desa* memiliki tujuan utama untuk memperkuat unsur akuntabilitas. Total dana yang terkumpul untuk upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* adalah Rp Rp 376.559.000 dan total biaya yang dihabiskan untuk upacara Rp 319.887.050. Dari sumber pemasukan dan pengeluaran terdapat sisa saldo upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* sebesar Rp 56.671.950. Sisa saldo ini akan dijadikan sebagai kas *desa adat* Tunju yang akan digunakan untuk upacara keagamaan lainnya. Hasil wawancara dari Nyoman Bakson ketua panitia *ngenteg linggih lan ngusaba desa* yang menyatakan bahwa,

“Lumayan banyak dana yang terkumpul waktu *nika* (itu) Rp 376.559.000. Yen *penelasne akeh taler* (kalau pengeluarannya banyak juga) Rp 319.887.050. *Wenten mase* (ada juga) saldo Rp 56.671.950 yang sesuai kesepakatan *krama desa* di *paruman* sisanya akan dijadikan kas *desa adat* untuk digunakan pada upacara keagamaan lainnya”.

Peranan Kearifan Budaya Lokal Pada Gelahang untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Upacara Ngenteg Linggih lan Ngusaba Desa

Kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan dan bernilai yang tertanam dan diikuti oleh warga masyarakatnya. (Wiana, 2010) untuk kesejahteraan *krama desanya desa adat* di Bali selalu berpegangan dengan pakem-pakem budaya lokal misalnya keberadaan konsep kearifan lokal *pada gelahang, menyama braya, paras paros sarpanaya selunglung sabayantaka, tat twam asi* yang tumbuh dalam setiap aktivitasnya. (Darmada, 2016) mengungkapkan bahwa *subak delod sema* desa Penarukan dalam upaya akuntabilitas memakai konsep *pada gelahang* yang mengintegrasikan *krama subak* Hindu dan Islam. Di *desa adat Tunju*, landasan budaya lokal tidak pernah pudar dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh *krama desa* begitu juga dengan pengelolaan

keuangan dari aktivitas tersebut. Di *desa* ini mengenal konsep *pada gelahang*. *Pada gelahang* sebenarnya sudah ada dalam budaya pernikahan di Bali. (Wayan p, Windia, 2016) mengungkapkan bahwa *pada gelahang* merupakan sebutan bagi orang yang sudah menikah tetapi harus mengemban dua tanggungjawab dikeluarga istri maupun suami. Berbeda dengan di *desa adat* Tunju, mengenal istilah *pada gelahang* sebagai suatu bentuk kearifan budaya lokal setempat, hal ini seperti yang disampaikan Ketut Arta selaku *bendesa adat* Tunju yang menyatakan bahwa,

“*Yen* (kalau) di *desa tyang niki* (saya ini) mengenal istilah *pada gelahang*. *Pada gelahang niki* (ini) sudah lama mendasari *upacara di desa driki* (desa di sini). Itu sama dengan semua milik bersama, *kenten* (begitu). Jadi upacara apapun yang dilaksanakan oleh *desa adat nike* (itu) semua menjadi tanggung jawab bersama. *Pada-pada gelahang keto* (sama-sama memiliki begitu), *jele melah* (jelek bagus) milik bersama *keto* (begitu), *dik*. *Yadiastundados* (meskipun menjadi) *prajuru desa, krama desangayah sareng sami, ten wenten* (tidak ada) perbedaan *dik*, upacara *niki* (ini) milik bersama, untuk keuangan juga demikian, *yen* (kalau) misalnya uang kan dipegang penuh oleh bendahara, tapi tetap itu uang bersama dan *krama desa* berhak mengetahui pertanggungjawabannya keuangannya. *Care tiang* (seperti saya) menjadi *prajuru desa tetep mase* (tetap juga) kena *peturunan, keto mase* (begitu juga) dengan panitia tetap kena *peturunan niki* (ini) sifatnya wajib dan bagi siapa saja tidak membayar dikenakan *penikel*. Semua dana bantuan dari pemerintah, *peturunan* semua dicatat biar mudah untuk dipertanggungjawabkan oleh bendahara”.

Dari pernyataan *bendesa adat* Tunju dengan adanya budaya *pada gelahang* membuat *krama desa adat* Tunju bersatu dan terintegrasi baik dalam upacara maupun pengelolaan keuangan dimana tidak adanya perbedaan antara *prajuru desa*, panitia dengan *krama desa*. Setiap orang diwajibkan untuk membayar *dana peturunan* dan dikenakan *penikel* jika tidak membayar. Setia dana yang masuk di panitia baik dana bantuan dari pemerintah maupun dari *peturunan krama desa* dicatat dalam pembukuan oleh bendahara, lalu dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan laporan itu diumumkan secara jelas dalam *paruman desa*. Meskipun bendahara yang bertugas memegang uang tetapi uang itu tetap milik bersama dan harus diketahui pertanggungjawabannya oleh *krama desa*. Hal ini adalah wujud nyata dari budaya *pada gelahang* yang mampu menyatukan dan mengintegrasikan *krama desa*. Rasa persatuan dan integrasi yang kuat membuat mereka malu untuk tidak membayar *dana peturunan* dan panitia tetap mengutamakan pertanggungjawaban dengan membuat laporan keuangan sehingga bisa meningkatkan akuntabilitas hal ini sesuai dengan teori dari (Darmada, 2016) yang mengungkapkan bahwa *subak delod sema* desa Penarukan dalam upaya akuntabilitas memakai konsep *pada gelahang* yang mengintegrasikan *krama subak* hindu dan islam. Jika tanpa adanya *pada gelahang* sebagai landasan budaya lokal yang kuat dan juga menjadi pengontrol dalam setiap aktivitas yang dilakukan belum tentu semua orang mau membayar *peturunan* dan panitia menjadi lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. *Pada gelahang* ini juga mampu mewujudkan kebersamaan dan rasa saling memiliki diantara *prajuru desa*, panitia upacara dan *krama desa* dalam pengelolaan keuangan. Hal ini disampaikan Nyoman Bakson selaku ketua panitia *ngenteg linggih lan ngusaba desa* bahwa, Dari pernyataan tersebut di atas, mengindikasikan bahwa kearifan budaya *pada gelahang* sangatlah kental pada setiap upacara yang dilaksanakan di *desa adat* Tunju. Konsep ini dipegang teguh oleh setiap *krama*, untuk menghilangkan adanya perbedaan antara *prajuru desa* dengan *krama desa*, sehingga menyatu dan terintegrasi. *Pada gelahang* ini sudah melekat dalam setiap aktivitas yang dilakukan seperti pada upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* hal ini disampaikan oleh Nyoman Bakson selaku ketua panitia *ngenteg linggih lan ngusaba desa* dalam hasil wawancara menyatakan bahwa,

“*Pada gelahang* menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan upacara, kalau *tiang* (saya) lihat baik sebelum maupun setelah upacara *ngenteg linggih lan ngusaba*

desa berlangsung diadakan *paruman desa*. Apapun yang dilakukan oleh panitia sebelumnya sudah dibicarakan dan merupakan keputusan bersama dalam *paruman desa*, seperti kesepakatan pengenaan *peturunan* secara merata meskipun menjadi *prajuru desa* ataupun panitia tetap kena *peturunan* dan bantuan dari pemerintah waktu *niki* kita sampaikan juga biar *krama desa* tahu karena didasari kebersamaan dan rasa saling memiliki. Selain *nika* (itu) pengeluaran kas untuk pembelian sarana upacara tidak hanya dilakukan oleh panitia saja namun dibantu oleh *prajuru desa*, *krama desa* dan juga *saye*. Notanya diserahkan ke bendahara biar nanti ada bukti untuk disampaikan kepada *krama desa*. Meskipun pembukuannya sederhana tetapi kita tetap mengupayakan membuat laporan yang bisa dimengerti dan jelas kemana saja aliran uangnya. Begitu juga dalam persiapan upacara kita *ngayah* bersama-sama”.

Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* dijabarkan dan diumumkan kepada *krama desa* secara keseluruhan dalam *paruman desa* yang dilaksanakan dengan agenda pembahasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Hal ini disampaikan Ketut Sirma selaku bendahara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* bahwa,

“Kalau transparan *nike* (itu) sudah pasti *nggih, kan* dalam berbelanja juga *ten* (tidak) mungkin *tiang* (saya) sendiri yang lakukan, pasti *wenten* (ada) yang membantu. Nanti notanya yang disetor ke *tiang* (saya). Pokoknya semua bagian dalam mengelola keuangan *niki* (ini) diketahui oleh seluruh *krama* (anggota).”

Pernyataan bendahara dalam kutipan wawancara diatas mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* tidak dilakukan sendiri oleh beliau. Dalam proses pengelolaan keuangan, bendaharajuga dibantu oleh *prajuru desa*, *krama desa* dan *saye*. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan upacara juga dijabarkan secara detail dan terperinci oleh panitia untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman.

Pernyataan dari ketua panitia dan bendahara senada dengan penyampaian Ketut Supelden selaku *krama desa adat* Tunju dalam hasil wawancara menyampaikan bahwa,

“Waktu *nika sesai* (sering) *ngayah krama desanengae* (membuat) persiapan upacaranya *lan sesai* (dan sering) *wenten* (ada) *paruman desa*, *krama desane takonine* (ditanya) *kude* (berapa) *sanggupne* (mampunya) *kena peturunan bange* (dikasi) pilihan Rp 50.000 atau Rp 100.000 *keto* (begitu). *Akhirne* (sepakat) *sepakat jak onye* (semua) *kena peturunan* Rp 100.000. *Nika* (itu) wajib sifatnya pada semua orang. Panitia tidak mengambil keputusan secara sepihak saja tapi kesepakatan bersama, menurut *tiang* (saya) itulah wujud kebersamaan dan rasa saling memiliki karena upacara ataupun keuangan menjadi tanggung jawab bersama. *Yen sing* (kalau tidak) disampaikan *maan* (dapat) bantuan *uli* (dari) pemerintah *tiang nak sing nawang* (saya tidak tahu), *untungne ade* (untungnya ada) *pada gelahang* semua *nika* (itu) disampaikan. *Suud* (selesai) upacara *biin ade* (lagi ada) *paruman* pertanggungjawaban membahas semua biaya yang dihabiskan, ada sisa dana sudah disampaikan di *paruman desa*”.

Dari pernyataan ketua panitia, bendahara dan *krama desa* dapat disimpulkan bahwa kearifan budaya lokal *pada gelahang* melandasi upacara dan pengelolaan keuangan *ngenteg linggih lan ngusaba desa* dimana nilai dari *pada gelahang* yaitu kebersamaan dan rasa saling memiliki yang begitu kuat diterapkan oleh panitia, *prajuru desa* dan *krama desa*. Mereka *ngayah* mempersiapkan sarana upacara secara bersama-sama. Selain itu apapun yang dilakukan oleh panitia sebelumnya sudah dibicarakan bersama *prajuru desa* dan juga *krama desa* melalui *paruman desa* seperti kesepakatan pengenaan *dana peturunan* sebesar

Rp 100.000 dan dikenakan secara merata kepada semua pihak. Kuatnya kebersamaan, rasa saling memiliki, saling membantu juga sangat terlihat ketika terjadi pengeluaran kas untuk membeli sarana dan prasarana upacara yang tidak hanya dilakukan oleh panitia namun dibantu oleh *krama desa*, *prajuru desa* dan juga *saye*. Nota-nota pembelian akan diserahkan kepada bendahara untuk dibuatkan laporan keuangan. Begitu juga dengan dana yang masuk di panitia baik dari bantuan pemerintah maupun dari *krama desa* semua dicatat, dibuatkan laporan keuangan dengan jelas, dipertanggungjawabkan dan disampaikan kepada *krama desa* agar diketahui biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan, berapa pemasukan dan sisa dananya sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas. Meningkatnya akuntabilitas tidak terlepas dengan adanya kebersamaan dan rasa saling memiliki karena panitia akan merasa malu jika melakukan kecurangan terhadap dana yang diberikan sehingga panitia selalu mengutamakan pertanggungjawaban dari dana tersebut.

Dari pernyataan ketua panitia *ngenteg linggih lan ngusaba desa* dan *krama desa* dapat disimpulkan bahwa *pada gelahang* sudah lama berkembang di *desa adat* Tunju dan mendasari setiap upacara keagamaan yang dilaksanakan salah satunya adalah *ngenteg linggih lan ngusaba desa*. Mulai dari *paruman*, mempersiapkan upacara semuanya saling membantu dan saling bekerja sama. Dalam upacara tersebut *krama desa*, panitia dan *prajuru desa* saling bersinergi agar upacaranya berjalan lancar. Rasa kebersamaan dan saling memiliki yang tinggi sangat terlihat dimana sebelum upacara berlangsung ada berbagai persiapan yang dilakukan seperti *ngayah* membuat sarana upacara, membuat *tetaring*, *penjor*, mencari bambu dan *krama desa* yang perempuan *ngayah* membuat *capah*, *ubag abig*, membuat *banten pengoleman* itu semua dikerjakan secara bersama-sama dan saling membantu tanpa adanya unsur paksaan. Dalam hal pengenaan *dana peturunan* juga konsep *pada gelahang* sangat dianut dimana dana peturunan ini dikenakan kepada semua baik itu *krama desa*, *prajuru desa* maupun panitia. Dalam pelaksanaan upacara juga demikian semuanya *ngayah*, baik panitia, *krama desa* maupun *prajuru desa* membantu pelaksanaan upacara pecaruan, melasti ke segara, dan menari rejang.

Pada gelahang ini juga sangat melekat dan mendasari pertanggungjawaban upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa*, *krama desa* tidak pernah menuntut pertanggungjawaban yang lebih dari panitia upacara. Meskipun pembukuannya masih sederhana yang penting jelas kemana aliran uangnya. Begitupun juga dengan panitia selalu mengumumkan berapa total *dana peturunan*, siapa saja yang *medana punia*, berapa *sesari* yang diperoleh, ada bantuan dari pemerintah, biaya yang dikeluarkan dalam upacara dan juga sisa dana itu semua disampaikan dalam *paruman* pertanggungjawaban yang melibatkan *prajuru desa* dan *krama desa* karena dimaknai sebagai tanggungjawab bersama ini merupakan cerminan bahwa budaya *pada gelahang* mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam upacara tersebut.

Pertanggungjawaban keuangan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* di *desa adat* Tunju masih sederhana hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh panitia dan belum ada standar yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan upacara di *desa adat*. Namun panitia upacara tetap mengupayakan untuk membuat pertanggungjawaban dengan baik mengenai pengelolaan keuangan upacara yang dananya sebagian besar berasal dari *krama desa*. Panitia upacara melakukan pertanggungjawaban cara membuat laporan keuangan, menyampaikan dan memperlihatkan laporan tersebut kepada *krama desa* pada saat *paruman desa*. Hal ini disampaikan oleh Ketut Sirma selaku bendahara bahwa,

“Bagi *tiang* (saya) akuntansi *nike* (itu) sangat penting *nggih*, walau *driki* (disini) panitianya tidak berasal dari jurusan akuntansi tapi *tiang* tetap berusaha untuk membuat pertanggungjawaban yang baik dan bisa dimengerti oleh *krama desa*. Walau pembukuannya masih sederhana tetapi *krama desa* tidak memperlakukan itu, meskipun begitu panitia (disini) sangat dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan”.

Pernyataan bendahara diperkuat oleh pernyataan Nyoman Mudin selaku *krama desa* yang menyatakan bahwa,

“Tentu saja dik, apapun upacaranya kita *sareng sami* saling bantu, bukan baru sudah ada panitia dan *prajuru*, mereka saja disuruh kerja, *ten kenten* (tidak begitu). *Yen masalah pis nak keto mase* (kalau masalah uang juga begitu) *pada gelahang*. *Yen ade mayah* (kalau ada yang membayar) *peturunan catate* (dicatat) *ken* (oleh bendaharane (bendaharanya), *nyanan umumange be* (nanti diumumkan) *diparuman*. *Yen* (kalau) ibu *nak percaya gen* (selalu percaya), karena panitia dan *prajuru sube cager-cager*. *Sing* (tidak) mungkin uang *nika* (itu) disalahgunakan. Apalagi *ampun wenten* (sudah ada) *pada gelahang* uang *nika* milik bersama. Meskipun sederhana pertanggungjawabane yang penting *jelas penelas pipise* (pengeluaran uangnya)”

Pertanggungjawaban keuangan yang sederhana tidak lantas membuat *krama desa* menuntut pertanggungjawaban yang lebih dari panitia. Rasa saling percaya yang tinggi membuat *krama desa* tidak pernah mempermasalahkan pertanggungjawaban yang disajikan oleh panitia, yang terpenting bagi *krama desa* dana yang dikelola jelas pemasukan maupun pengeluarannya. Begitu juga dengan panitia yang diberi amanah berusaha tetap membangun kepercayaan yang telah diberikan dan senantiasa menjamin akuntabilitas penyajian laporan pertanggungjawaban keuangannya. Rasa saling percaya ini merupakan wujud dari kuatnya budaya lokal *pada gelahang*.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa 1) Sumber dana upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* berasal dari (A) *dana peturunankrama desa* sebesar Rp 100.000 per kepala keluarga (KK) dengan total *dana peturunan* yang terkumpul sebesar Rp 100.000.000. B) Bantuan keuangan khusus (BKK) dari pemerintah provinsi Bali pada tahun 2019 sebesar Rp 137.200.000. C) *Dana punia* berupa uang sebesar Rp 124.577.000 dan *dana punia* yang berupa barang. D) *Sesari banten* yang dihaturkan oleh *krama desa* dari awal sampe akhir upacara dengan jumlah Rp 10.572.000 dan E) Hasil penjualan baju kaos dan *pekir* (ikat kepala) sebesar Rp 4.210.000. 2) Proses pengelolaan keuangan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* melalui tiga tahapan yaitu tahap perencanaan dilakukan dengan pembentukan panitia, penerimaan dan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara serta penyusunan rancangan anggaran biaya (RAB). Pada tahap pelaksanaan terjadi pengeluaran kas yang digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana upacara yang melibatkan panitia upacara, *prajuru desa* dan *krama desa*. Tahapan yang terakhir adalah pertanggungjawaban dari panitia kepada *prajuru desa* dan *krama desa* sebagai pemberi amanah yang dilakukan melalui *paruman desa*. Akuntabilitas pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan oleh panitia dengan membacakan dan memperlihatkan laporan keuangan yang berisi pemasukan yang diperoleh, rincian biaya yang dikeluarkan selama melaksanakan upacara dan sisa dana upacara pada saat *paruman desa* yang diselenggarakan pada tanggal 17 Nopember 2019, dan 3) Peranan kearifan budaya lokal *pada gelahang* adalah mampu mewujudkan rasa saling memiliki, kebersamaan, saling membantu, saling percaya, dan integrasi yang kuat antara pihak *prajuru desa*, panitia dan *kramadesa* dalam pengelolaan keuangan upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* di *desa adat Tunju*.

Dalam mempersiapkan sarana upacara *prajuru desa*, panitia dan *krama desa* melakukan *ngayah* secara bersama-sama. Dalam pengelolaan keuangan rasa saling memiliki, kebersamaan dan integrasi yang kuat sangat terlihat karena apapun yang dilakukan oleh panitia sebelumnya sudah dibicarakan dan merupakan keputusan bersama dalam *paruman desa* yaitu pengenaan *dana peturunan* Rp 100.000 dan *dana peturunan* dikenakan secara merata kepada semua pihak tanpa memandang *prajuru desa* maupun panitia. Semua pemasukan baik dari pemerintah maupun dari *krama desa* semua dicatat, dibuatkan pembukuan, laporan pertanggungjawaban dan disampaikan di *paruman desa* agar diketahui oleh *prajuru* maupun *krama desa*. Dalam pengeluaran kas untuk membeli sarana

upacara tidak hanya dilakukan oleh panitia namun dibantu oleh *prajuru desa*, *krama desa* dan juga *saye* hal ini menunjukkan kuatnya pada gelahang yaitu saling membantu. Rasa saling percaya yang tinggi membuat *krama desa* tidak pernah memperlakukan pertanggungjawaban yang masih sederhana oleh panitia dan yang terpenting bagi *krama desa* dana yang dikelola jelas pemasukan maupun pengeluarannya. Dengan adanya nilai-nilai dari pada gelahang ini panitia yang diberi amanah berusaha tetap membangun kepercayaan yang telah diberikan, lebih bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan keuangan dan senantiasa menjamin akuntabilitas penyajian laporan pertanggungjawaban keuangannya.

Terdapat beberapa saran yang bisa peneliti berikan bagi panitia upacara *ngenteg linggih lan ngusaba desa* saat melaksanakan *paruman desa* mengenai laporan pertanggungjawaban, panitia sebelum membacakan laporan tersebut sebaiknya membagikan print out laporan kepada seluruh *krama desa* sehingga *krama desa* bisa mengetahui dengan jelas mengenai pemasukan dan pengeluaran upacara. Selain itu laporan keuangan yang telah diumumkan secara lisan sebaiknya ditempel di wantilan *pura Desa* agar *krama desa* yang berhalangan hadir pada saat *paruman* bisa mengetahui informasi keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran upacara. Bagi *krama desa adat Tunju* yang berhalangan hadir saat dilaksanakan *paruman* pertanggungjawaban sebaiknya lebih aktif dalam mencari informasi kepada *kramadesa* yang hadir pada saat *paruman* agar bisa mengetahui dengan jelas pemasukan dan pengeluaran upacara. Bagi yang akan meneliti kedepannya diharapkan dapat menambahkan kajian teori yang mendukung penelitian terkait dengan peranan kearifan budaya lokal *pada gelahang* untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan upacara *ngenteg linggihlanngusaba desa* karena penelitian ini masih terdapat kekurangan.

Daftar Rujukan

- Atmadja, A. T., & Dkk. (2013). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Darmada, D. K. (2016). *Pada Gelahang Sebagai Kearifan Budaya Lokal untuk Mewujudkan Integrasi Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak (Studi Fenomenologi Pada Subak Multikultur Di Desa Penarukan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Dewi, N. W. Y. (2008). *Akuntabilitas dan Bingkai Filosofis Tri Hita Karana: Suatu Eksplorasi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Dharmajati, Tukadmungga Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali*. Universitas Brawijaya.
- Hanafi, R. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Lestari, A. K. D. (2014). *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan)*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Moloeng, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali
- Mulyasa. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Warisando, K. D. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Upacara Ngenteg Linggih Studi Kasus Pada Dadia Pasek Gelgel Di Desa Pakraman Tangguwisia, Kecamatan Seririt*. Universitas Pendidikan Ganesha.

Wayan p, Windia, Ke. S. (2016). Pengantar Hukum Adat Bali. In *Cetakan kedua, Swasta Nulus bekerjasama dengan BALI Shanti*.

Wiana, I. K. (2010). *Tri Hita Karana Dalam Hindu*. Surabaya: Paramitha.